

Kiai, Pesantren dan Kuasa Pendidikan

Menguak Peran Kiai dalam
Kebijakan Pendidikan

Dr. Moh. Ismail, S.Pd.I., M.Pd.I.



Kiai, Pesantren dan Kuasa Pendidikan

Menguak Peran Kiai dalam
Kebijakan Pendidikan

Dr. Moh. Ismail, S.Pd.I., M.Pd.I.



KIAI, PESANTREN, DAN KUASA PENDIDIKAN

Menguak Peran Kiai dalam Kebijakan Pendidikan

Copyright © 2026 Cita Cendekia

Penulis : Dr. Moh. Ismail, S.Pd.I., M.Pd.I.
Penyunting : M. Yusuf
Desain Sampul : Ucup
Layouter : Ucup

Cetakan I, April 2026
xviii + 270 hal; 15.5 x 23 cm

ISBN 978-634-05-0292-3 :

Cover by: canva.com

Dirterbitkan oleh:



CV. Cita Cendekia

Jl. Jemur Wonosari Gg. Masjid No. 42

Wonocolo Surabaya

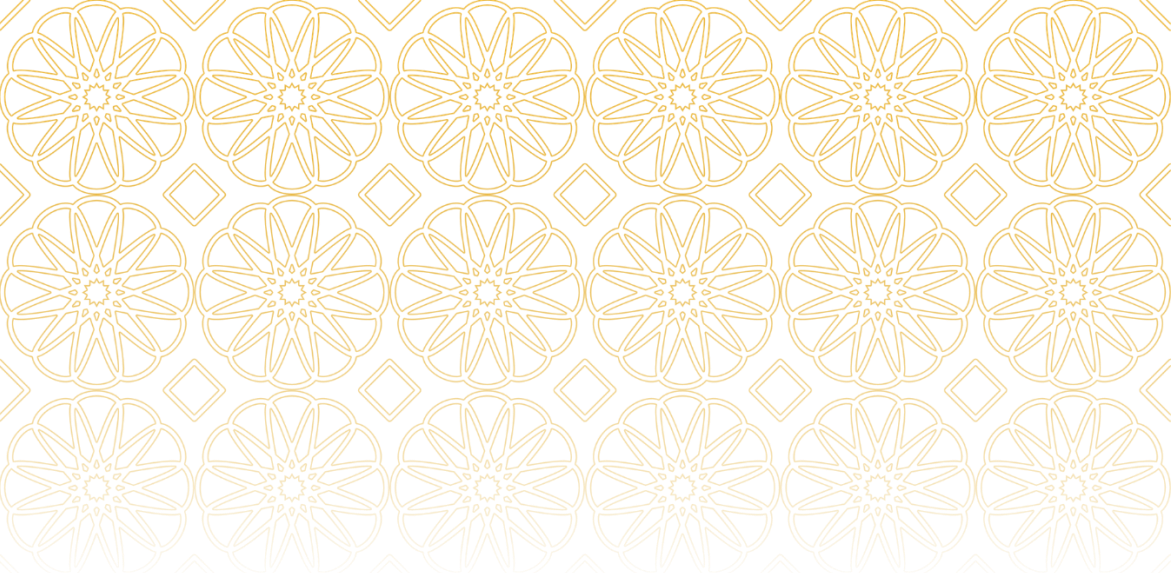
WA. 082223616142

<https://citacendekia.com/buku/>

citacendekiaoffice@gmail.com

© 2026

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis termasuk menfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.



Kata Pengantar

Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa, M.Si.

Guru Besar Sosiologi &

Pengasuh Pesantren Lahur Al-Husna Surabaya

Alḥamdulillāhi Rabbil ‘Ālamīn. Segala puji hanya milik Allah Swt. yang telah menganugerahkan nikmat iman, ilmu, dan kesempatan kepada umat manusia untuk terus belajar, berpikir, dan mengembangkan peradaban. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok pendidik agung yang meletakkan fondasi masyarakat berilmu, berakhlak, dan berkeadaban. Berkat keteladanan beliau, tradisi keilmuan Islam tumbuh dan berkembang, melahirkan institusi-institusi pendidikan yang menjadi penjaga sekaligus penggerak peradaban, termasuk pesantren yang hingga hari ini tetap menjadi bagian penting dari identitas bangsa Indonesia.

Membicarakan pesantren sesungguhnya tidak cukup hanya melihatnya sebagai lembaga pendidikan. Dalam perspektif sosiologi, pesantren merupakan institusi sosial yang memiliki sejarah panjang dalam membangun struktur kehidupan masyarakat Indonesia. Ia adalah ruang berlangsungnya proses reproduksi budaya, pewarisan nilai, pembentukan kepemimpinan, penguatan solidaritas sosial, hingga lahirnya berbagai gerakan transformasi masyarakat. Pesantren tidak hanya menghasilkan lulusan yang memahami ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki orientasi moral, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap kehidupan kebangsaan.

Dalam keseluruhan sistem tersebut, sosok kiai menjadi titik sentral yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pesantren. Kiai bukan sekadar pemilik atau pengelola lembaga pendidikan, melainkan figur yang memperoleh legitimasi dari keluasan ilmu, integritas moral, keteladanan hidup, serta pengabdian kepada masyarakat. Otoritas seorang kiai dibangun melalui proses sosial yang panjang, sehingga kehadirannya diterima bukan semata-mata karena struktur formal, tetapi karena kepercayaan kolektif yang tumbuh dari pengalaman masyarakat. Di sinilah letak keunikan kepemimpinan pesantren yang berbeda dengan berbagai model kepemimpinan dalam organisasi modern.

Sebagai seorang sosiolog, saya memandang bahwa kiai merupakan salah satu bentuk kepemimpinan sosial yang memiliki modal simbolik, modal budaya, dan modal sosial yang sangat kuat. Pengaruh seorang kiai tidak hanya hadir di lingkungan pesantren, tetapi menjangkau masyarakat luas melalui jaringan alumni, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, aktivitas dakwah, hingga ruang-ruang pengambilan

keputusan publik. Karena itu, setiap gagasan, sikap, maupun keputusan yang diambil oleh seorang kiai sering kali memiliki implikasi yang jauh melampaui batas-batas institusi yang dipimpinnya.

Atas dasar itulah saya memandang bahwa tema yang diangkat dalam buku "Kiai, Pesantren, dan Kuasa Pendidikan: Mengungkap Peran Kiai dalam Kebijakan Pendidikan" merupakan tema yang sangat relevan, aktual, sekaligus strategis. Selama ini pembahasan mengenai pesantren lebih banyak diarahkan pada aspek kurikulum, tradisi pembelajaran, kitab kuning, atau sejarah kelembagaan. Sementara itu, kajian mengenai relasi antara kepemimpinan kiai, dinamika kekuasaan, dan proses pembentukan kebijakan pendidikan masih relatif terbatas. Padahal, dalam realitas kehidupan berbangsa, pesantren merupakan salah satu aktor penting yang ikut memberi warna terhadap arah kebijakan pendidikan nasional, khususnya pendidikan Islam.

Istilah "kuasa" yang digunakan dalam judul buku ini hendaknya tidak dipahami secara sempit sebagai dominasi atau kontrol terhadap pihak lain. Dalam perspektif ilmu sosial, kuasa merupakan kemampuan untuk memengaruhi cara berpikir, membentuk orientasi nilai, menggerakkan tindakan kolektif, dan menghasilkan perubahan sosial. Dalam konteks tersebut, kuasa pendidikan yang dimiliki seorang kiai lahir dari kombinasi antara legitimasi keilmuan, kepercayaan masyarakat, keteladanan moral, serta kapasitas membangun jaringan sosial yang luas. Kuasa semacam ini justru menjadi kekuatan yang memungkinkan pesantren terus bertahan menghadapi berbagai perubahan zaman.

Sejarah bangsa Indonesia memberikan banyak bukti bahwa pesantren tidak pernah berada di pinggir perjalanan

bangsa. Pada masa perjuangan kemerdekaan, pesantren menjadi pusat konsolidasi umat dan pembentukan semangat kebangsaan. Pada masa pembangunan nasional, pesantren menjadi mitra pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Memasuki era reformasi hingga transformasi digital dewasa ini, pesantren kembali menunjukkan kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan identitas. Fleksibilitas tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan para kiai yang mampu membaca perubahan sosial sekaligus menjaga kesinambungan tradisi.

Sebagai pengasuh pesantren, saya menyaksikan secara langsung bahwa kepemimpinan seorang kiai pada masa kini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa-masa sebelumnya. Perubahan teknologi informasi, perkembangan media digital, globalisasi pengetahuan, demokratisasi ruang publik, hingga perubahan karakter generasi muda menuntut hadirnya model kepemimpinan yang lebih adaptif. Kiai tidak lagi cukup hanya menjadi sumber otoritas keagamaan, tetapi juga dituntut menjadi komunikator, mediator, inovator, dan pemimpin kelembagaan yang mampu mengelola perubahan secara bijaksana.

Dalam konteks kebijakan pendidikan, hubungan antara pesantren dan negara juga mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Pengakuan negara terhadap pesantren melalui berbagai regulasi merupakan tonggak penting dalam sejarah pendidikan nasional. Namun demikian, hubungan tersebut harus dipahami sebagai hubungan yang saling menguatkan, bukan saling mendominasi. Negara membutuhkan pesantren sebagai mitra strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, sedangkan pesantren membutuhkan kebijakan yang

memberikan ruang bagi berkembangnya kekhasan tradisi, kemandirian, dan inovasi pendidikan.

Buku ini memberikan ruang diskusi yang menarik mengenai bagaimana para kiai memainkan peran strategis tersebut. Penulis berupaya memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan tidak pernah lahir secara linear dari birokrasi pemerintahan semata, tetapi juga merupakan hasil dialog panjang antara negara, masyarakat, organisasi keagamaan, serta tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh sosial. Dalam konteks inilah keberadaan kiai menjadi penting sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat, kebutuhan pesantren, dan arah pembangunan pendidikan nasional.

Saya melihat salah satu kekuatan buku ini terletak pada keberaniannya menghubungkan kajian kepesantrenan dengan teori-teori sosial mengenai kepemimpinan, otoritas, kekuasaan, dan perubahan sosial. Pendekatan seperti ini memperkaya cara pandang kita terhadap pesantren. Pesantren tidak lagi hanya dipahami sebagai institusi pendidikan tradisional, tetapi juga sebagai arena sosial tempat berlangsungnya negosiasi nilai, reproduksi budaya, pembentukan identitas kolektif, serta pengembangan kepemimpinan masyarakat.

Di sisi lain, buku ini juga mengingatkan bahwa kekuatan pesantren sesungguhnya tidak hanya bertumpu pada figur kiai sebagai individu, melainkan pada sistem nilai yang terus diwariskan secara turun-temurun. Keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan modal sosial yang menjadikan pesantren tetap bertahan di tengah perubahan zaman. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi utama yang harus terus dipelihara ketika pesantren memasuki ruang-ruang baru dalam pengembangan pendidikan, teknologi, ekonomi, maupun kebijakan publik.

Sebagai seorang akademisi, saya mengapresiasi kesungguhan penulis dalam menyusun buku ini. Pembahasan yang sistematis, argumentasi yang logis, serta keberanian mengangkat isu yang aktual menunjukkan bahwa karya ini disusun melalui proses intelektual yang serius. Buku ini tidak hanya memperkaya kajian tentang pesantren, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan sosiologi pendidikan, sosiologi agama, studi kepemimpinan Islam, dan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Saya berharap buku ini menjadi salah satu referensi penting bagi dosen, mahasiswa, peneliti, pengelola pesantren, birokrat pendidikan, maupun para pengambil kebijakan yang ingin memahami posisi strategis pesantren dalam pembangunan bangsa. Lebih dari itu, saya berharap buku ini mampu mendorong lahirnya berbagai penelitian lanjutan mengenai transformasi kepemimpinan kiai, tata kelola pesantren, hubungan agama dan negara, serta kontribusi pesantren dalam membangun masyarakat Indonesia yang inklusif, berkeadaban, dan berkemajuan.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada penulis atas terbitnya karya yang bernilai akademik ini. Semoga buku ini menjadi bagian dari ikhtiar kolektif dalam memperkuat tradisi keilmuan, memperkaya khazanah studi pesantren, serta menghadirkan perspektif baru mengenai relasi antara kiai, pesantren, dan kebijakan pendidikan.

Surabaya, Maret 2026

Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa, M.Si.



Kata Pengantar

Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., M.A., Ph.D.

*(Guru Besar Ilmu Sosial dan Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Ampel Surabaya)*

Buku “Kiai, Pesantren, dan Kuasa Pendidikan” merupakan kontribusi akademik yang penting dalam memperkaya khazanah studi Islam, khususnya pada persilangan antara sosiologi agama, antropologi pendidikan, dan studi kekuasaan. Karya ini tidak hanya menyajikan deskripsi empiris yang mendalam mengenai relasi antara kiai, pesantren, dan pendidikan di Bangkalan Madura, tetapi juga menawarkan kerangka teoretis yang kuat dalam memahami dinamika tersebut sebagai bagian dari konstruksi sosial yang kompleks dan berlapis (*multifaceted*).

Salah satu kontribusi utama buku ini terletak pada kemampuannya menempatkan kiai sebagai aktor strategis dalam struktur sosial. Penulis menunjukkan bahwa kiai tidak

dapat dipahami semata sebagai figur religius dan spiritual yang berfungsi dalam transmisi pengetahuan keagamaan, melainkan sebagai agen sosial, bahkan politik, yang memiliki kapasitas untuk memproduksi, mereproduksi, dan mentransformasikan tatanan sosial. Posisi ini menempatkan kiai dalam peran yang melampaui batas-batas institusi pesantren, menjangkau arena sosial, budaya, hingga politik.

Dalam perspektif teori sosial, argumen ini memiliki resonansi kuat dengan pemikiran Pierre Bourdieu, khususnya dalam karya *Outline of a Theory of Practice* (1977) dan *The Forms of Capital* (1986). Bourdieu menegaskan bahwa praktik sosial dibentuk oleh relasi antara habitus, modal (*capital*), dan arena (*field*). Dalam kerangka ini, kiai dapat dipahami sebagai aktor yang memiliki akumulasi modal sosial, kultural, dan simbolik yang signifikan. Modal sosial kiai tercermin dalam jaringan relasional yang luas antara santri, alumni, dan masyarakat; modal kulturalnya berakar pada penguasaan ilmu agama dan otoritas keilmuan; sementara modal simboliknya bersumber dari legitimasi religius dan kharisma yang diakui secara kolektif.

Akumulasi modal tersebut kemudian beroperasi dalam suatu habitus yang khas—yakni sistem disposisi yang terinternalisasi dan membentuk cara berpikir, bertindak, serta merespons realitas (Bourdieu, 1977). Habitus kiai memungkinkan fleksibilitas strategis dalam menghadapi perubahan sosial, sekaligus mempertahankan kontinuitas tradisi. Dalam konteks ini, pesantren dapat dipahami sebagai arena sosial tempat berlangsungnya kontestasi dan distribusi

berbagai bentuk modal, sekaligus sebagai institusi yang mereproduksi struktur sosial melalui mekanisme pendidikan.

Namun demikian, temuan buku ini tidak sekadar mengafirmasi teori Bourdieu. Menurut Pierre Bourdieu, praktik sosial sangat dipengaruhi oleh relasi antara *habitus*, *capital*, dan *field*. Struktur cenderung mereproduksi dirinya melalui mekanisme yang relative stabil. Sementara itu, penulis buku ini, Dr. Moh. Ismail, S.Pd.I, M.Pd.I, berargumen bahwa kiai tidak hanya mereproduksi struktur, tetapi juga secara aktif mentransformasikan struktur sosial. Habitus kiai dalam konteks Bangkalan Madura tampak lebih reflektif dan strategis, tidak sepenuhnya “terbentuk” oleh struktur, tetapi juga mampu mengintervensi dan menggeser arena (*field*).

Lebih jauh, pembacaan terhadap pesantren dalam buku ini juga dapat diperkaya melalui perspektif relasi kuasa sebagaimana dirumuskan oleh Michel Foucault dalam *Power/Knowledge* (1980) dan *Discipline and Punish* (1977). Foucault melihat kuasa tidak semata-mata sebagai sesuatu yang represif, tetapi juga produktif—ia bekerja melalui jaringan diskursus, praktik, dan institusi. Dalam kerangka ini, pesantren tidak dapat dipahami sebagai ruang pedagogis yang netral, melainkan sebagai *locus* di mana pengetahuan dan kuasa saling berkelindan. Melalui proses pendidikan, nilai, norma, dan otoritas tidak hanya ditransmisikan, tetapi juga dinormalisasi dan dilegitimasi.

Konteks Bangkalan Madura yang menjadi *locus* kajian memberikan dimensi empiris yang kaya bagi argumentasi buku ini. Struktur sosial masyarakat Madura yang ditandai oleh kuatnya relasi patron-klien, penghormatan tinggi terhadap otoritas religius, serta keterikatan kultural terhadap pesantren, menjadikan posisi kiai semakin sentral. Dalam lanskap sosial

seperti ini, kiai tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai mediator sosial, broker budaya, dan bahkan aktor politik yang memiliki pengaruh signifikan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Menurut perpektif Foucauldian, kuasa bersifat tersebar (*diffused*), tidak terpusat, dan bekerja melalui jaringan diskursus serta institusi. Dalam konteks ini, buku yang ada di hadapan sidang pembaca sekaligus membantah teori Foucault dengan menegaskan bahwa dalam konteks pesantren di Madura, kuasa justru tampak “menggumpal” dan terpersonifikasi pada figur kiai. Relasi kuasa tidak sepenuhnya cair dan anonim, tetapi seringkali terkonsentrasi dalam otoritas karismatik individual. Kiai menjadi titik simpul di mana kuasa, pengetahuan dan legitimasi bertemu secara konkret.

Dalam konteks yang lebih luas, analisis buku ini juga sejalan dengan tradisi sosiologi pendidikan kritis sebagaimana dikembangkan oleh Bowles dan Gintis dalam *Schooling in Capitalist America* (1976), yang menekankan bahwa institusi pendidikan berperan dalam mereproduksi struktur sosial dan relasi kekuasaan. Pesantren, dalam hal ini, tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tetapi juga menjadi medium reproduksi nilai, otoritas, dan stratifikasi sosial, meskipun dengan karakteristik khas yang membedakannya dari institusi pendidikan modern lainnya.

Dengan demikian, buku ini berhasil menunjukkan bahwa pendidikan pesantren tidak dapat direduksi menjadi sekadar proses pedagogi. Ia merupakan praktik sosial yang sarat dengan dimensi kekuasaan, di mana aktor-aktor seperti kiai memainkan peran sentral dalam menentukan arah perubahan sosial. Pendekatan ini menegaskan pentingnya membaca institusi pendidikan dalam kerangka distribusi modal dan relasi kuasa,

sebagaimana ditekankan dalam tradisi sosiologi kritis kontemporer.

Jika Bowles dan Gintis lebih menekankan bahwa Pendidikan cenderung mereproduksi struktur kelas dan ketimpangan sosial, maka buku ini memberikan perspektif yang berbeda dengan menegaskan bahwa pesantren tidak hanya menjadi alat reproduksi sosial, tetapi juga ruang mobilitas sosial dan transformasi kultural. Santri tidak selalu “dikondisikan” untuk mempertahankan status quo, tetapi dapat menjadi agen perubahan di masyarakatnya. Di sisi lain, kiai tidak semata agen reproduksi ideologi, tetapi juga aktor emansipatoris dalam konteks tertentu. Dengan demikian, buku ini menggeser pandangan deterministik tentang pendidikan sebagai alat reproduksi, menuju pemahaman bahwa pendidikan pesantren memiliki potensi transformatif dalam konteks tertentu.

Secara metodologis dan konseptual, buku ini layak diapresiasi karena mampu menjembatani refleksi teoretis dengan realitas empiris. Ia tidak hanya memperkaya literatur tentang pesantren dan kiai, tetapi juga membuka ruang diskursus yang lebih luas mengenai bagaimana agama, pendidikan, dan kekuasaan saling berinteraksi dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia.

Akhirnya, kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa dalam bidang studi Islam, pendidikan, dan ilmu sosial, serta bagi para pengambil kebijakan yang berkepentingan dalam pengembangan pendidikan berbasis pesantren. Lebih dari itu, buku ini mengingatkan bahwa di balik praktik pendidikan yang

tampak sederhana, terdapat struktur sosial yang kompleks dan relasi kuasa yang terus bekerja, dinegosiasikan, dan diproduksi ulang dalam kehidupan sehari-hari.

Surabaya, 14 Maret 2026.

Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., M.A., Ph.D.



Pengantar Penulis

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini yang berjudul “Kiai, Pesantren, dan Kuasa Pendidikan: Menguak Peran Kiai dalam Kebijakan Pendidikan”. Buku ini lahir dari kegelisahan akademik penulis terhadap dinamika relasi antara kiai, pesantren, dan sistem pendidikan nasional yang terus berkembang. Di tengah arus modernisasi dan perubahan kebijakan pendidikan, peran kiai sebagai aktor sosial-keagamaan sering kali mengalami pergeseran makna. Oleh karena itu, buku ini berupaya menghadirkan refleksi kritis dan analitis mengenai posisi strategis kiai dalam membentuk arah kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam konteks pesantren.

Penulisan buku ini berangkat dari kesadaran bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan tradisional, melainkan juga pusat reproduksi nilai, budaya, dan kekuasaan

sosial-keagamaan yang sangat kuat. Kiai sebagai figur sentral dalam pesantren memiliki pengaruh yang tidak hanya terbatas pada ruang pendidikan internal, tetapi juga merambah pada kebijakan publik yang lebih luas. Dalam banyak kasus, pandangan dan sikap kiai turut memengaruhi arah kebijakan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antara kiai, pesantren, dan negara merupakan hubungan yang kompleks dan dinamis, sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam dan sistematis.

Buku ini juga dilatarbelakangi oleh keinginan penulis untuk memahami lebih jauh bagaimana otoritas kiai terbentuk, dipertahankan, dan dinegosiasikan dalam konteks perubahan sosial. Dalam perspektif sosiologis, kiai tidak hanya dipandang sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki modal simbolik, kultural, dan bahkan politik. Modal tersebut memungkinkan kiai untuk memainkan peran penting dalam ruang pendidikan dan kebijakan. Oleh sebab itu, penting untuk menelaah bagaimana kekuasaan simbolik tersebut bekerja dalam memengaruhi kebijakan pendidikan di tingkat lokal maupun nasional.

Selain itu, transformasi sistem pendidikan di Indonesia yang semakin birokratis dan modern menimbulkan tantangan tersendiri bagi pesantren dan kiai. Kebijakan pendidikan yang cenderung sentralistik sering kali berhadapan dengan nilai-nilai tradisional yang hidup di lingkungan pesantren. Dalam konteks ini, kiai berada pada posisi yang unik, yaitu sebagai penjaga tradisi sekaligus sebagai aktor yang harus beradaptasi dengan perubahan. Buku ini mencoba menjelaskan bagaimana kiai merespons perubahan tersebut, serta bagaimana strategi yang mereka gunakan untuk tetap mempertahankan eksistensi pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

Kajian dalam buku ini juga menyoroti bagaimana relasi antara negara dan pesantren mengalami dinamika dari waktu ke waktu. Pada satu sisi, negara berupaya melakukan standarisasi pendidikan melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Namun pada sisi lain, pesantren memiliki sistem nilai dan struktur otoritas yang khas dan sulit diseragamkan. Ketegangan inilah yang menjadi salah satu fokus utama pembahasan dalam buku ini. Penulis berupaya menunjukkan bahwa relasi tersebut tidak selalu bersifat konflik, tetapi juga dapat berbentuk kolaborasi yang saling menguntungkan dalam konteks pembangunan pendidikan nasional.

Dalam konteks historis, pesantren telah lama menjadi bagian penting dari perjalanan pendidikan di Indonesia. Kiai sebagai pendiri dan pengasuh pesantren memainkan peran sentral dalam membentuk karakter pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keislaman, moral, dan spiritualitas. Buku ini mencoba menelusuri bagaimana sejarah panjang tersebut membentuk otoritas kiai hingga saat ini. Dengan memahami sejarahnya, diharapkan pembaca dapat melihat bahwa posisi kiai dalam kebijakan pendidikan bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang yang berakar dalam tradisi sosial dan keagamaan.

Penulis juga menyoroti bagaimana perubahan sosial, globalisasi, dan perkembangan teknologi memengaruhi pola kepemimpinan kiai di pesantren. Di era digital saat ini, otoritas tidak hanya ditentukan oleh kedalaman ilmu agama, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman. Kiai dituntut untuk mampu menjembatani nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas. Buku ini mengkaji bagaimana kiai melakukan adaptasi tersebut tanpa kehilangan identitas

keulamaan mereka, sekaligus tetap relevan dalam percaturan kebijakan pendidikan yang semakin kompleks.

Lebih jauh, buku ini mengkaji konsep kuasa dalam perspektif pendidikan. Kuasa tidak hanya dipahami sebagai dominasi, tetapi juga sebagai kemampuan untuk memengaruhi, membentuk, dan mengarahkan kebijakan serta praktik pendidikan. Dalam konteks ini, kiai memiliki posisi strategis karena mereka tidak hanya menjadi pendidik, tetapi juga pembentuk opini dan kebijakan di tingkat lokal. Penulis berupaya mengurai bagaimana kuasa tersebut bekerja dalam jaringan sosial pesantren, serta bagaimana ia berinteraksi dengan institusi pendidikan formal dan negara.

Metode pendekatan yang digunakan dalam buku ini bersifat kualitatif dengan penekanan pada analisis sosiologis dan pendidikan. Penulis berupaya memahami fenomena kiai dan pesantren tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari realitas empiris yang terjadi di lapangan. Data diperoleh melalui kajian literatur, observasi, serta refleksi atas berbagai fenomena pendidikan di lingkungan pesantren. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembahasan dalam buku ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan komprehensif mengenai peran kiai dalam kebijakan pendidikan.

Salah satu fokus penting dalam buku ini adalah bagaimana kiai berperan sebagai aktor kebijakan tidak formal. Meskipun secara struktural mereka tidak selalu berada dalam lembaga pemerintahan, pengaruh mereka sering kali sangat signifikan dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia tidak hanya dibentuk oleh negara, tetapi juga oleh aktor-aktor sosial keagamaan seperti kiai. Buku ini berusaha mengungkap mekanisme pengaruh tersebut dalam berbagai level kebijakan.

Selain itu, buku ini juga membahas peran pesantren sebagai institusi pendidikan alternatif yang memiliki karakteristik unik. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter dan moralitas. Dalam konteks ini, kiai memiliki peran ganda sebagai pendidik, pembimbing spiritual, sekaligus pengambil kebijakan internal pesantren. Kompleksitas peran ini menjadi salah satu aspek penting yang dianalisis dalam buku ini.

Penulis juga menyoroti tantangan yang dihadapi pesantren dalam menghadapi kebijakan pendidikan nasional yang semakin terstandarisasi. Standarisasi tersebut sering kali menuntut penyesuaian kurikulum, administrasi, dan sistem evaluasi yang tidak selalu sejalan dengan tradisi pesantren. Dalam situasi ini, kiai memainkan peran penting dalam melakukan negosiasi antara tuntutan negara dan kebutuhan internal pesantren. Buku ini mengkaji bagaimana proses negosiasi tersebut berlangsung dalam praktiknya.

Dalam perspektif teori kekuasaan, kiai dapat dipahami sebagai pemilik modal simbolik yang kuat. Modal ini berasal dari legitimasi keilmuan agama, kharisma personal, serta jaringan sosial yang luas. Buku ini mencoba menjelaskan bagaimana modal simbolik tersebut digunakan untuk memengaruhi kebijakan pendidikan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian, peran kiai tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga politis dalam arti yang luas.

Buku ini juga menekankan pentingnya memahami pesantren sebagai sistem sosial yang kompleks. Di dalamnya terdapat struktur hierarkis, nilai-nilai budaya, serta pola interaksi yang khas. Kiai sebagai pusat otoritas memiliki peran sentral dalam menjaga keberlangsungan sistem tersebut. Oleh karena

itu, setiap perubahan dalam kebijakan pendidikan akan selalu berinteraksi dengan struktur sosial pesantren yang telah mapan. Hal ini menjadikan kajian tentang kiai dan pesantren sangat penting dalam memahami dinamika pendidikan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi data maupun analisis. Namun demikian, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian tentang pendidikan Islam, khususnya yang berkaitan dengan peran kiai dan pesantren. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Selain kontribusi akademik, buku ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi para pemangku kebijakan pendidikan. Pemahaman yang lebih baik tentang peran kiai dalam kebijakan pendidikan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan kontekstual. Dengan demikian, hubungan antara negara dan pesantren dapat terjalin secara lebih harmonis dan produktif.

Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT, dan segala kekurangan dalam buku ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan atas setiap usaha yang dilakukan.

Penulis,

Moh. Ismail



Pengantar Penerbit

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul “Kiai, Pesantren, dan Kuasa Pendidikan: Menguak Peran Kiai dalam Kebijakan Pendidikan” dapat hadir di tengah para pembaca. Penerbit menyambut dengan penuh syukur atas terbitnya karya ini sebagai bagian dari kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah kajian pendidikan Islam di Indonesia. Buku ini diharapkan menjadi salah satu rujukan penting bagi siapa saja yang memiliki perhatian terhadap dinamika pesantren, kiai, dan kebijakan pendidikan nasional.

Di tengah arus perubahan sosial dan transformasi kebijakan pendidikan yang semakin cepat, keberadaan kajian yang mendalam mengenai peran kiai menjadi sangat relevan. Penerbit memandang bahwa buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan akademik sekaligus sosial, terutama dalam memahami bagaimana otoritas keagamaan berinteraksi dengan

sistem pendidikan formal. Relasi antara pesantren dan negara bukanlah sesuatu yang sederhana, melainkan penuh dengan dinamika historis, kultural, dan politik yang kompleks.

Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang posisi kiai sebagai aktor penting dalam dunia pendidikan. Tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, kiai juga memiliki peran strategis dalam membentuk arah kebijakan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penerbit menilai bahwa kajian ini penting untuk membuka wawasan pembaca mengenai bagaimana kekuasaan simbolik dan sosial bekerja dalam konteks pendidikan berbasis pesantren.

Penerbit mengapresiasi pendekatan analitis yang digunakan dalam buku ini, yang mampu mengurai konsep-konsep seperti kuasa, otoritas, dan institusi pesantren secara mendalam. Dalam perspektif ini, pesantren tidak hanya dipahami sebagai lembaga pendidikan tradisional, tetapi juga sebagai ruang produksi pengetahuan, nilai, dan kebijakan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter pendidikan bangsa.

Kehadiran buku ini juga menjadi penting dalam menjembatani pemahaman antara dunia akademik dan realitas lapangan. Sering kali terdapat kesenjangan antara kebijakan pendidikan yang dirumuskan secara formal dengan praktik pendidikan di pesantren. Buku ini membantu menjelaskan bagaimana kiai berperan dalam menjembatani kesenjangan tersebut melalui mekanisme sosial dan kultural yang mereka miliki.

Penerbit juga melihat bahwa buku ini memberikan kontribusi dalam memperkaya diskursus tentang pendidikan Islam di Indonesia. Kajian mengenai kiai dan pesantren tidak

hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga dalam konteks pembangunan pendidikan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, buku ini memiliki nilai strategis baik secara akademik maupun praktis.

Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, pesantren menghadapi berbagai tantangan baru yang menuntut adaptasi tanpa harus kehilangan identitasnya. Buku ini menunjukkan bagaimana kiai memainkan peran penting dalam proses adaptasi tersebut, sehingga pesantren tetap relevan di tengah perubahan zaman. Hal ini menjadi salah satu kekuatan utama dari kajian yang disajikan dalam buku ini.

Penerbit berharap buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi akademisi, peneliti, mahasiswa, serta para pemangku kebijakan di bidang pendidikan. Lebih dari itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkeadilan, khususnya yang berkaitan dengan lembaga pendidikan pesantren.

Kami juga mengapresiasi kerja keras penulis dalam menyusun dan menyelesaikan buku ini dengan penuh dedikasi. Proses penulisan yang mendalam dan reflektif ini menunjukkan keseriusan dalam mengangkat tema yang sangat penting dan strategis bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Penerbit merasa bangga dapat menjadi bagian dari perjalanan intelektual ini.

Akhirnya, penerbit mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses penerbitan buku ini hingga selesai. Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam dan kajian pesantren. Kritik dan saran

yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya-karya selanjutnya di masa mendatang.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR (Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa, M.Si.) –[iii]

KATA PENGANTAR (Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., M.A., Ph.D.) –[ix]

PENGANTAR PENULIS –[xv]

PENGANTAR PENERBIT –[xxi]

DAFTAR ISI –[xxv]

BAGIAN I

KERANGKA AWAL PEMIKIRAN –[1]

BAGIAN II

TINJAUAN UMUM PARTISIPASI AKTOR –[13]

Definisi Partisipasi –[13]

Prinsip-Prinsip Partisipasi –[18]

Bentuk dan Tipe Partisipasi –[19]

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi –[22]

Macam-Macam Partisipasi –[25]

Tahapan dan Tingkatan Partisipasi –[27]

BAGIAN III

KIAI DAN PESANTREN –[31]

Definisi Kiai –[31]

Tipologi Kiai –[37]

Fungsi dan Tugas Kiai –[38]

Partisipasi Kiai dalam Dunia Politik –[39]

Akar Historis Pesantren di Indonesia –[53]

Definisi Pesantren –[58]

Elemen Pesantren –[60]

Metode Pembelajaran Pesantren –[67]

Dinamika Perkembangan Dunia Pesantren –[70]

BAGIAN IV

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENDIDIKAN –[83]

Definisi Kebijakan Publik –[83]

Stakeholder Kebijakan Publik –[87]

Analisis Kebijakan Publik –[90]

Implementasi Kebijakan Publik –[91]

Evaluasi Kebijakan Publik –[93]

Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik –[96]

Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia –[99]

BAGIAN V

BANGKALAN DAN DINAMIKA PERAN KIAI DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN –[117]

Geografis –[117]

Sosial Ekonomi –[119]

Pendidikan –[123]

Pondok Pesantren –[127]

Sosial Budaya –[140]

Sejarah Pemerintahan Bangkalan –[147]

BAGIAN VI

RELASI KUASA KIAI DAN PEJABAT PUBLIK DI BANGKALAN –[151]

Relasi Paternalistik –[154]

Relasi Kolegial –[159]

Relasi Ideologis –[165]

BAGIAN VII

PARTISIPASI KIAI PESANTREN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI BANGKALAN –[179]

Partisipasi Intensif –[180]

Partisipasi Moderat –[188]

Partisipasi Konfrontatif –[196]

BAGIAN VIII

IMPLIKASI PARTISIPASI KIAI PESANTREN DAN PENENTUAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI BANGKALAN –[205]

Dominasi Kiai terhadap Pejabat Publik dan Masyarakat –[207]

Peningkatan Kualitas Pendidikan Islam di Bangkalan –[217]

Respon Masyarakat terhadap Partisipasi Kiai Pesantren dalam Penentuan Kebijakan Pendidikan di Bangkalan –[234]

BAGIAN IX

EPILOG –[241]

DAFTAR PUSTAKA –[249]

PROFIL PENULIS –[265]



BAGIAN I

Kerangka Awal Pemikiran

Gerakan reformasi nasional telah membawa perubahan mendasar dalam arah pembangunan Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan. Perubahan tersebut ditandai dengan menguatnya semangat demokratisasi, pengakuan terhadap persamaan derajat manusia, serta desentralisasi pembangunan. Namun demikian, reformasi juga meninggalkan berbagai persoalan pendidikan, baik pada tataran mikro maupun makro. Pada level mikro, persoalan kualitas dan relevansi pendidikan masih menjadi tantangan serius, sementara pada level makro, isu pemerataan, desentralisasi, dan manajemen pendidikan terus menjadi perdebatan. Dalam konteks ini, pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis dalam pemberdayaan individu dan



BAGIAN II

Tinjauan Umum Partisipasi Aktor

Definisi Partisipasi

Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan seperti perumusan kebijakan khususnya kegiatan pembangunan. Partisipasi menurut pandangan Poerwadarminto adalah sejumlah orang yang turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta.²³ Partisipasi secara formal didefinisikan sebagai turut wewenang baik secara mental dan emosional memberikan sumbangsih kepada proses pembuatan dimana keterlibatan secara pribadi orang yang bersangkutan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.²⁴

²³ Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdiknas 1984), 998.

²⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), 7.



BAGIAN III

Kiai dan Pesantren

Definisi Kiai

Tema kiai dalam penelusuran penulis, merujuk pada bahasa Jawa.⁴³ Ahmad Adaby, mengurai kata kiai berasal dari bahasa Jawa yaitu "*kiya-kiya*", yang artinya orang yang dihormati.⁴⁴ Secara operasional, istilah kiai digunakan untuk tiga jenis gelar: *pertama*, sebagai gelar kehormatan bagi benda atau hewan yang dianggap keramat, seperti *Kiai Garuda Kencana* dan *Kiai Rebo* dan *Kiai Wage*. *Kedua*, gelar yang diberikan kepada orang tua pada umumnya. Dan *Ketiga*, gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki

⁴³ Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, terj. Burche B. Soendjojo (Jakarta: P3M, 1986), 130.

⁴⁴ Moh. Eksan, *Kiai Kelana (Biografi Kiai Muchid Muzadi)* (Yogyakarta: LKIS, 2000), 1.



BAGIAN IV

Kebijakan Publik dalam Pendidikan

Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewith menyatakan dalam pendapatnya, kebijakan adalah sebuah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi *reward* dan *sanctions*. Secara sentralistik, kebijakan adalah



BAGIAN V

Bangkalan dan Dinamika Peran Kiai dalam Kebijakan Pendidikan

Geografis

Kabupaten Bangkalan berada pada bagian sebelah barat Pulau Madura, terletak pada koordinat $112^{\circ}40'6''$ – $113^{\circ}08'04''$ Bujur Timur serta $6^{\circ}51'39''$ – $7^{\circ}11'39''$ Lintang Selatan. Kabupaten Bangkalan memiliki luas 1.260,14 Km² terbagi menjadi 18 Kecamatan, 273 desa dan 8 kelurahan. Untuk memudahkan pemahaman penjelasan di atas, berikut ini tabel penjelasan luas masing-masing kecamatan tersebut. Sedangkan batas administrasi wilayah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Sampang

Sebelah Selatan : Selat Madura



BAGIAN VI

Relasi Kuasa Kiai dan Pejabat Publik di Bangkalan

Kiai dalam konteks ini adalah kiai pesantren merupakan pemegang “kuasa” dalam persoalan keagamaan, yang berposisi sangat terhormat. Melalui posisi tersebut, kiai mampu mempengaruhi dan menggerakkan aksi sosial para santrinya, masyarakat dan pejabat publik. Dengan potensi itu, tidak jarang sosok kiai terlibat –atau sengaja dilibatkan- dalam percaturan politik hingga penentuan kebijakan, terutama bidang pendidikan pada masing-masing daerahnya.

Sejarah mencatat bahwa Indonesia ketika diliputi masa-masa kolonial, sosok kiai tampil di garda terdepan dalam mengobarkan semangat anti kolonialisme kepada masyarakat. Seperti KH. Hasyim Asy’ari yang mencetuskan gaung resolusi jihad pada para santrinya yang kemudian menjadi kesadaran kolektif masyarakat untuk tetap mempertahankan kemerdekaan



BAGIAN VII

Partisipasi Kiai Pesantren dan Kebijakan Pendidikan di Bangkalan

Seorang kiai/ulama dituntut memiliki peran di segala bidang kehidupan. Di bidang agama, ulama bertugas menyampaikan *risalah*, penegak moral dan simbol agama. Di sisi lain kiai/ulama juga berperan dalam bidang kehidupan yang bersifat profan; ekonomi, sosial budaya dan politik. Hal ini dikarenakan, studi tentang kiai tidak hanya dapat di lihat dari satu faktor saja (kiai sebagai pemuka/tokoh agama), melainkan kiai mempunyai banyak wajah (*multy faces*) yang mencerminkan kompleksitas atau keragaman cara pandangan kiai dalam berpolitik. Di kalangan ulama sunni dan begitu juga kebanyakan kiai di Indonesia melihat hubungan keduanya tidak terpisahkan.

Partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan tidak dapat dihindarkan, meski sebagian kiai tidak terikat dengan partisipasi tersebut. Partisipasi terjadi bukan



BAGIAN IX

Epilog

Buku ini lahir dari pergulatan intelektual sekaligus refleksi panjang penulis terhadap dinamika hubungan antara kiai, pesantren, dan kekuasaan dalam konteks pendidikan Islam di Bangkalan. Apa yang disajikan bukan sekadar kumpulan data empiris, tetapi juga upaya memahami realitas sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pesantren. Kiai sebagai figur sentral tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan, tetapi juga memainkan peran strategis dalam ruang sosial dan politik. Dalam konteks ini, pesantren menjadi lebih dari sekadar lembaga pendidikan, melainkan ruang produksi nilai, kekuasaan, dan legitimasi sosial yang terus berinteraksi dengan struktur pemerintahan.

Relasi antara kiai dan kekuasaan dalam buku ini ditunjukkan sebagai relasi yang dinamis dan tidak tunggal. Ia dibentuk oleh sejarah panjang, tradisi keilmuan, serta struktur sosial yang mengakar kuat dalam masyarakat Bangkalan. Kiai



Daftar Pustaka

- Afan, Gaffar, *Politik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Al-Kailani, Majid Irsan, *Tatawwur Mafhum al-Nazariyyat al-Tarbawiyah*, Beirut: Dar Ibn Kathir, 1985.
- Anderson, James E, *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984.
- Arif, Mahmud, *Pendidikan Islam Transformatif*, Yogyakarta: LKIS, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arsal, Thriwaty, *Partisipasi Politik Elit Agama Islam di Kota Magelang*, Magelang: FIS Unnes, 2004.
- Assegaf, Abd. Rahman, *Internasionalisasi Pendidikan; Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*, Yogyakarta: Gama Media, 2003.

- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Badaruddin, Kemas, *Filsafat Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bakar, Abu dan Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam: Respon Kreatif terhadap Undang-Undang SISDIKNAS*, Yogyakarta: Safiria Insani Pres, 2005.
- Barry, Troyna dan, David Halpin, *Researching Education Policy: Ethical and Methodological Issues*, London: The Falmer Press, 1994.
- Bawani, Imam, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Bisri, M. Cholil, *Ketika Nurani Bicara*, Bandung: remaja Rosda Karya: 2000.
- Bogdan, Robert C. and Sari Knoop Biklen, *Qualitative Research of Education; An Introduction to Theory and Method*, Boston: Allyn Bacon, 1992.
- Bruce, Jennings, 'Interpretation And The Practice Of Policy Analysis' dalam Frank Fischer & John Forester (Eds.), *Confronting Values In Policy Analysis: The Politics Of Criteria*. Newbury Park: Sage, 1987: 128-52; Douglas Torgerson, 'Between Knowledge And Politics: Three Faces Of Policy Analysis', *Policy Sciences* 19, 1, 1986.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Carley, Michael, *Rational Techniques In Policy Analysis*. London Heinemann, 1980.
- Carol, H. Weiss, 'Research For Policy's Sake: The Enlightenment Od Social Science Research', *Policy Analysis* 3, 4, 1977: 531-45.

- Charles, E. Lindblom, *'The Science of Muddling Through'*, Public Administration Review 19, 2, 1959.
- Dahl, Robert A. & Charles E. Lindblom, *Politics, Economics And Welfare: Planning And Politico-Economic Systems Resolved Into Basic Social Processes* New York: Harper And Row, 1953.
- Darajat, Zakiah, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Davis, Keith, *Human Behavior At Work: Organizational Behavior* Grolier Incorporated, 1985.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S., *"Pendahuluan: Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif"* dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Penerj. Dariyatno dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Devine, F. *Qualitative Analysis*, in D. Marsh and G. Stoker (eds) *Theories and Methods in Political Science* London: Macmillan, 1995.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hauve, 1997 , Cet. 4.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2011.
- Dirdjosanjoto, Pradjarta, *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar*, Jakarta: LKIS, 1994.
- Djamas, Nurhayati, *Dinamika Pendidikan di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
- Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah mada Universiti perss, 2005.

- Dwiningrum, Siti Irene Astuti, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: kota pelajar, 2009.
- Dye, Thomas R, *Understanding Public Policy*, Singapore: Loughman, 2001.
- Ealau dan Pewitt, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Handal Niaga Pustaka, 2007.
- Edwards, Ward, 'The Theory Of Decision-Making', *Psychological Bulletin* 51, 4, 1954: 380-417.
- Eksan, Moh, *Kiai Kelana (Biografi Kiai Muchid Muzadi)*, Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Elste, John r, ' *The Possibility of Rational Politics*', dalam David Held (Ed.), *Political Theory Today*. Oxford: Polity, 1991.
- Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hauve, 1997.
- Eriyanto, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Fadjar, Malik, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia, 1999.
- Fahrurrozi, *Pesantren Modern dan Masyarakat Madani* (Refleksi Atas Pendidikan Pesantren Sistem Mu'allimin) *Reflektika*, September 2002 Vol. I.
- Faridl, Miftah, *Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia* Jurnal Sosioteknologi, Agustus 2007, Edisi xi, 6
- Fayol, Henry, *Studies In The Science of Administration*, 1985.
- Fialy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama': Sejarah NU 1955-1967*. Yogyakarta: LKIS, 2003.

- Gortmer, Harold, Mahler Julianne & Nicholson Bell Jeanne, *Organization Theory: A Public Perspective*, Chicago: Dorsey Press, 1987.
- Gullick, Luther, 'Notes On the Theory of Organizations', dalam Luther Gullick & Lyndal Urwick (Eds.), *Papers On The Science of Administration*. (New York: Institute Of Public Administration, 1937.
- Haedari, Amin, *Masa Depan Pesantren*, Jakarta: IRD Press, 2005.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Hari Zamharir, Muhammad, *Agama dan Negara Analisis Kritis Pemikiran Politik Nur Kholis Madjid*, Jakarta: PT. Raja grafindo, 2004.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.
- Herbert, A. Simon, 'A Behavioral Model Of Rational Choice', *Quarterly Journal Of Economics* 69, 1, 1955: 99-118; Herbert A. Simon, *Models Of Man, Social And Rational: Mathematical Essays On Rational Human Behavior In A Social Setting*. New York: Wiley, 1957.
- Hisbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ife, Jim, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ismail, *Politik Pendidikan Islam di Daerah (Studi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan*

Madrasah Diniyah) Surabaya: Disertasi UIN Sunan Ampel, 2017.

J. Taylor dan Bogdan Steven, *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meaning*, New York: John Wiley dan Son Inc., 1984.

Jailani, Abdul Qadir, *Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1994.

Jalal, Fasli, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.

James, E. Anderson, *Public Policy Making: An Introduction*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1998.

Jeanne, Bell Nicholson dan Harold Gortmer, Julianne Mahler. *Organization Theory: A Public Perspective*. Chicago: Dorsey Press, 1987.

Jennings, Bruce, 'Interpretation And The Practice Of Policy Analysis' dalam Frank Fischer & John Forester (Eds.), *Confronting Values In Policy Analysis: The Politics Of Criteria*, Newbury Park: Sage, 1987.

Kamal, Tamrin, *Purifikasi Ajaran Islam Pada masyarakat Minangkabau*, Padang: Angkasa raya, 2006.

Kartodirdjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1994.

Keban, T Yeremias. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.

Keller, Suzanne, *Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Khoirudin, *Politik Kiai; Polemik Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis*, Malang: Averroes Press, 2005.

- Kosim, Mohammad, *Pondok Pesantren di Pamekasan Pertumbuhan dan Perkembangan*, Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2002.
- Landman, Todd, *Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction*, London: Routledge, 2003.
- Langguglung, Hasan, *Tujuan Pendidikan dalam Islam: Kajian Tentang Berbagai Masalah. Kontemporer*, Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988.
- Lindblom, Charles E., 'The Science of Muddling Through', *Public Administration Review* 19, 2, 1959: 79-88;
- Lindblom, Charles E. 'Policy Analysis', *American Economic Review* 48, 3, 1958: 298-312.
- Madjid, Nurcholis, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Mahfud, Choirul, *Politik Pendidikan Islam di Indonesia, Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru*, Surabaya: Disertasi UIN Sunan Ampel, 2013.
- Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Majid, Nurkholis, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Maksum, *Pra Pembelajaran di Pesantren* Direktorat Jendral Kelembagaan Islam: t.p., 2003.
- Mardiyah, *Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2013.
- Marimba, Ahmad D, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Maarif, 1989.

- Marzali, Amri, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mas'ud, Abdurrahman, *Intlektual Pesantren, Perhelatan Agama dan Tradisi*, Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Maschan, Ali, *Nasiolalisme Kiai, Konstuksisoial Berbasis Agama*, Yokyakarta: liks, 2007.
- Mashud, M. Sulton, dkk, *Menejemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2003.
- Mastudi, Dkk, *Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2003.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994.
- Mikkelsen, Britha, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan* Penerjemah: Matheos Nalle. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muchlis Solichin, Mohammad, "*Kepemimpinan Kiai dalam Mobilisasi Kekuasaan Politik Umat (Studi Kasus Peran Kepemimpinan Kiai dalam Mobilisasi Kekuatan Umat Islam di Kabupaten Pa mekasan pada Masa Reformasi)*" Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001.
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan PSAPM, 2004.
- Muhajir, Noeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Mukhlishi, *Pesantren dan Politik Pendidikan: Relasi Elite Pesantren dengan Pemangku Kebijakan Pendidikan di*

- Sumenep, Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.
- Munir, Ahmad, *Tafsir Tarbawi : Mengungkap Pesan al-Qur'an Tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Nahlawi, Abdurrahman, *Pendidikan Islam Di Rumah Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Nasir, Ridlwan, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Nasution S, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nasution, Harun, *Pembaruan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Nizar, Samsul, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- O. Jones, Clarles, *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Patoni, Achmad, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Patria, Nezar dan Arief Andi, *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Pewitt dan Ealau, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Handal Niaga Pustaka, 2007.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdiknas 1984 998.
- Purwoko, Bambang, "Perilaku Politik Elit Agama dalam Dinamika Politik Lokal", dalam *Focus Groups Discussion*, "Perilaku Elit Politik dan Elit Agama dalam Pilkada di Kabupaten Kulonprogo", diselenggarakan oleh LABDA Shalahuddin,

- JPPR, dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 3 Agustus 2006.
- Qomar, Muzammil, *NU 'Liberal': Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*, Bandung: Mizan, 2002.
- Rahardjo, M. Dawam, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1993.
- Raharjo, Mudjia, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Ramayulis & Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan : Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama (NU) 22 Oktober 1945 Jawa Pos: Minggu, 23 Oktober 2016.
- Robert A. Dahl & Charles E. Lindblom, *Politics, Economics And Welfare: Planning And Politico-Economic Systems Resolved Into Basic Social Processes*. New York: Harper And Row, 1953; Charles E. Lindblom, *Bargaining*. Los Angeles: Rand Corporation, 1955.
- Ross Murray G, and B.W. Lappin, *Community Organization: Theory, Principles And Practice*. Second Edition NewYork: Harper & Row Publishers, 1967.
- Saerozi, Muh, *Politik Pendidikan Agama Dalam Era Pluralisme Telaah Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia*, Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijogo, 2003.
- Seyyed, Hossein Nasr dalam Deden Makbuloh, "*Globalisasi dan Dinamika Masyarakat Muslim*" *Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Desember 2008, , Vol. 26, No. 2

- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2002. Vol.10.
- Shiddiqie, Hasbi, *Al Islam II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Sihab, Alwi, *Islam Sufistik "Islam Pertama" dan Pengaruhnya hingga Kini di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2001.
- Sirozi, M, *Politik Pendidikan: Dinamika Antara Hubungan Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sirozi, Muhammad, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran tokoh-tokoh Islam dalam penyusunan UU No. 2/1989*, Jakarta: - , 2004.
- Soelaiman, Holil, *Partisipasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Badan penelitian dan pengembangan, 1980.
- Solichin, Muchlis Mohammad, *"Kepemimpinan Kiai dalam Mobilisasi Kekuasaan Politik Umat "Studi Kasus Peran Kepemimpinan Kiai dalam Mobilisasi Kekuatan Umat Islam di Kabupaten Pamekasan pada Masa Reformasi"*, Surabaya: Tesis IAIN Sunan Ampel , 2000.
- Staniland, Martin, *"What is Political Economy?: A Study of Social Theory and Underdevelopment"*, dalam Deliarnov, *Ekonomi Politik*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Stenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Steven Bogdan, dan J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meaning*, New York: John Wiley dan son Inc, 1984.
- Strauss Anselm & Juliet Corbin, *Basic of qualitative Research, Grounded Theory Procedures and Techniques*, terj. M. Shodiq Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. VII, 2009.
- Suharso, Puguh, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis*, Jakarta: PT Indeks, 2009.
- Suharto, Toto, *Rekonstruksi dan Modernisasi: Menuju Revitalisasi Lembaga Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2005.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Sumampouw, Monique, *Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*. Jacob Rais, et al. *Menata Ruang Laut Terpadu*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Sumaryadi, I Nyoman, *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sunggono, Bambang, *Partai Politik, Dalam Kerangka Pembangunan Politik Di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1992.
- Suprayogo, Imam, *Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Suprayogo, Imam, *Reformalisasi Visi Pendidikan Islam*, Malang: STAIN Press, 1999.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Suryadi, Ace *Analisis Kebijakan Pendidikan suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.
- Syah, Muhibbin, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.

- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Persepektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Tajab, Zaini (et.al.), *Dasar-Dasar Kependidikan Islam: Suatu Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, Surabaya: Karya Aditama, 1996.
- Thoha, Miftah, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Thoha, Mohammad, *Politik Pendidikan Islam Potret Sejarah Periode Klasik Sampai Abad Pertengahan*, Pamekasan: Jurnal Tarbiyah Tadris, 2013.
- Thomas, R. Dye, *Understanding Public Policy*, Singapore: Loughman, 2001.
- Tilaar, H.A.R, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Titmuss, *Social Policy*, Jakarta: Handal Niaga Pustaka, 1974.
- Todd, Landman, *Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction*, London: Routledge, 2003.
- Torgerson, Douglas, '*Between Knowledge And Politics: Three Faces Of Policy Analysis*', Policy Sciences 19, 1, 1986.
- Turmudi, Endang, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKIS, 2003.
- UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1.
- Van Bruinessen, Martin, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, Jakarta: Mizan, 1995.

- Van Bruinessen, Martin, *Rakyat kecil, Islam dan Politik*, Yogyakarta: Yayasan Bentangbudaya, 1999.
- Vide H, Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- W Littlejohn, Stephen, *Theories of Human Communication*, Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 1992.
- Wahab, Rohidin, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Wahab, Solichin Abdul, *analisis kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Wahid, Abdul & Vide Bashori Muchsin, Moh. Sulthon, *Pendidikan Islam Humanistik*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Wahid, Abdurrahman dalam Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat: Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. Jakarta: LKIS, 1994.
- Wibawa, Samudra, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis, Intermedia*, Jakarta: Kencana, 1994.
- Wijaya, Willie, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Semarang: Bintang Jaya, 2004.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*, Yogyakarta: Medpress, 2007.
- Yasmadi, *Islamisasi Pesantren. Kritik Nur Kholis Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, Ciputat: Quantum Teaching. 2005.
- Yatim, Badri, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Ziemek, Manfred, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, terj. Burche B. Soendjojo, Jakarta: P3M, 1986.

Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) kabupaten Bangkalan tahun 2005-2025.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Bangkalan tahun 2013-2018.

Bangkalan dalam angka data statistik daerah kabupaten Bangkalan 2015.

Kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2015.

Prioritas dan plapon anggaran sementara perubhan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2015.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan (PERDA).

Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan (PERBUB).

Musyawarah Pembangunan (MUSREMBANG) 2015.

Dinas Pendidikan (DISPEN) Kabupaten Bangkalan.

Kementian Agama (KEMENAG) Kabupaten Bangkalan.

Profil Penulis



Dr. Moh. Ismail, S.Pd.I., M.Pd.I. lahir di Sumenep pada 03 Juni 1987, tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Sejak kecil, ia telah diperkenalkan dengan tradisi keilmuan pesantren yang membentuk karakter, etika, dan orientasi hidupnya.

Ayahnya, K. Ibrahim Hamza As-Sanusi, dan ibunya, Suhartini, menjadi figur penting yang menanamkan semangat belajar serta komitmen terhadap pendidikan agama. Lingkungan keluarga yang sederhana namun sarat nilai spiritual ini menjadi fondasi awal bagi perjalanan intelektual dan akademiknya di kemudian hari.

Masa kecil Moh. Ismail dihabiskan di kampung halamannya di Manding, Aenganyar, Giligenting, Sumenep. Ia tumbuh bersama saudara-saudaranya, Siti Zhulaicha, Maulana

Ishaq, dan Achmad Ya'qub, dalam suasana kekeluargaan yang hangat dan religius. Kehidupan di daerah kepulauan dengan keterbatasan akses pendidikan justru memupuk semangatnya untuk terus belajar dan berkembang. Sejak dini, ia telah menunjukkan ketekunan dan kedisiplinan yang kelak menjadi ciri khas dalam perjalanan akademiknya.

Pendidikan formalnya dimulai di SDN Aenganyar Giligenting Sumenep pada tahun 1993 hingga 1999. Pada jenjang ini, ia mulai menunjukkan ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keagamaan. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke SLTPN 1 Giligenting Sumenep pada tahun 1999 hingga 2002. Masa ini menjadi fase penting dalam pembentukan kepribadian remaja yang mulai mengembangkan minat terhadap dunia pendidikan Islam secara lebih serius.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertama, Moh. Ismail melanjutkan ke MAN Sumenep pada tahun 2004 hingga 2007. Di lembaga ini, ia semakin mendalami ilmu-ilmu keislaman sekaligus memperkuat kemampuan akademiknya. Lingkungan madrasah yang religius dan kompetitif memberikan ruang bagi dirinya untuk berkembang secara intelektual maupun spiritual. Di masa ini pula, ia mulai menunjukkan minat yang kuat terhadap dunia pendidikan sebagai bidang yang akan digelutinya di masa depan.

Di samping pendidikan formal, Moh. Ismail juga menempuh pendidikan nonformal di berbagai pesantren. Ia pernah nyantri di Pondok Pesantren Al-Hasan Giligenting pada tahun 2002–2004, yang menjadi awal pendalaman ilmu agama secara tradisional. Pengalaman ini memperkaya wawasan keagamaannya serta membentuk kedisiplinan hidup ala pesantren. Tradisi belajar kitab kuning dan kehidupan

sederhana menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter dirinya.

Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Al-Akhsan Pasar Sore Loteng Sumenep pada tahun 2004–2007. Di pesantren ini, ia semakin matang dalam memahami khazanah keilmuan Islam klasik. Interaksi dengan para kiai dan sesama santri membentuk kepekaan sosial serta kemampuan berdialog dalam kerangka keilmuan. Pengalaman ini menjadi bekal penting dalam mengintegrasikan tradisi pesantren dengan dunia akademik modern.

Perjalanan intelektualnya berlanjut di Pesantren Luhur Al-Husna Jemur Wonosari Surabaya pada tahun 2007 hingga 2017. Di pesantren ini, ia tidak hanya memperdalam ilmu agama, tetapi juga mengembangkan wawasan keilmuan yang lebih luas. Lingkungan akademik Surabaya yang dinamis memberikan kesempatan baginya untuk berinteraksi dengan berbagai pemikiran dan tradisi intelektual yang beragam. Hal ini semakin memperkaya perspektifnya dalam memahami pendidikan Islam.

Pada tahun 2007, Moh. Ismail melanjutkan pendidikan tinggi di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada program studi Pendidikan Agama Islam. Selama menempuh pendidikan S-1 (2007–2011), ia aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan organisasi. Ketekunan dan semangat belajarnya membuahkan hasil dengan menyelesaikan studi tepat waktu. Masa ini menjadi awal dari perjalanan akademiknya yang lebih serius dalam bidang pendidikan Islam.

Tidak berhenti di jenjang sarjana, ia melanjutkan studi S-2 di UIN Sunan Ampel Surabaya pada program yang sama, yaitu Pendidikan Agama Islam (2012–2014). Pada jenjang ini, ia mulai mengembangkan minat penelitian dan kajian ilmiah, khususnya dalam bidang pendidikan Islam dan dinamika sosial

keagamaan. Kemampuannya dalam analisis akademik semakin terasah melalui berbagai tugas dan penelitian yang dilakukannya.

Komitmennya terhadap dunia akademik terus berlanjut dengan melanjutkan studi S-3 di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014 hingga 2017. Pada jenjang doktoral ini, ia semakin memperdalam kajian pendidikan Islam dengan pendekatan yang lebih kritis dan komprehensif. Pengalaman akademik ini memperkuat kapasitasnya sebagai seorang peneliti dan akademisi yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di lingkungan pesantren.

Selain aktif dalam dunia akademik, Moh. Ismail juga memiliki pengalaman organisasi yang cukup luas. Ia pernah menjadi pengurus HMJ PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel pada tahun 2008–2009. Keterlibatannya dalam organisasi ini menjadi sarana untuk mengasah kemampuan kepemimpinan dan manajerial. Ia belajar bagaimana mengelola program kerja serta membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak.

Selanjutnya, ia juga aktif di Dewan Mahasiswa (DEMA) IAIN Sunan Ampel pada tahun 2009–2010 serta Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Tarbiyah pada tahun 2010–2011. Dalam organisasi ini, ia terlibat dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan yang bersifat akademik maupun sosial. Pengalaman ini memberikan wawasan yang luas tentang dinamika organisasi serta pentingnya peran mahasiswa dalam pengembangan institusi pendidikan.

Keterlibatannya dalam organisasi kemahasiswaan juga ditunjukkan dengan perannya sebagai Ketua OSCAAR DEMA IAIN Sunan Ampel pada tahun 2009–2010. Posisi ini menuntut

kemampuan kepemimpinan yang kuat serta tanggung jawab dalam mengelola berbagai kegiatan mahasiswa baru. Ia berhasil menjalankan peran tersebut dengan baik, sekaligus memperluas jaringan dan relasi di kalangan mahasiswa dan akademisi.

Selain itu, Moh. Ismail juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ia pernah menjadi pengurus Komisariat PMII cabang Surabaya Selatan (2009–2010) dan Pengurus Cabang PMII Surabaya Selatan (2010–2011). Pengalaman ini memperkaya perspektifnya dalam memahami dinamika sosial dan keagamaan di masyarakat, sekaligus memperkuat komitmennya terhadap nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

Terakhir, ia juga terlibat dalam Pusat Pengembangan Intelektual (P2I) Pascasarjana IAIN Sunan Ampel pada tahun 2012–2013. Keterlibatan ini menunjukkan konsistensinya dalam mengembangkan kapasitas intelektual serta berkontribusi dalam dunia akademik. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, pengalaman pesantren yang mendalam, serta keterlibatan organisasi yang luas, Moh. Ismail hadir sebagai sosok akademisi yang berkomitmen dalam pengembangan pendidikan Islam yang integratif dan berkelanjutan.

Kiai, Pesantren dan Kuasa Pendidikan

Menguak Peran Kiai dalam Kebijakan Pendidikan

Buku “Kiai, Pesantren, dan Kuasa Pendidikan: Menguak Peran Kiai dalam Kebijakan Pendidikan” mengkaji secara mendalam posisi strategis kiai dalam sistem pendidikan Indonesia, khususnya dalam konteks pesantren dan kebijakan pendidikan nasional. Kiai tidak hanya dipahami sebagai figur spiritual dan pengasuh pesantren, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan, implementasi, dan dinamika kebijakan pendidikan. Melalui pendekatan sosiologis dan pendidikan, buku ini menyoroti bagaimana otoritas kiai terbentuk dari kombinasi antara modal keilmuan agama, kharisma personal, serta jaringan sosial yang luas di tengah masyarakat.

Lebih jauh, buku ini mengurai relasi kompleks antara pesantren dan negara dalam kerangka kebijakan pendidikan. Di satu sisi, negara hadir dengan berbagai regulasi dan standarisasi pendidikan yang bersifat formal dan birokratis. Di sisi lain, pesantren memiliki sistem nilai, tradisi, dan otoritas kultural yang khas dan tidak selalu mudah diseragamkan. Dalam ketegangan sekaligus dialog inilah kiai memainkan peran penting sebagai mediator yang mampu menegosiasikan kepentingan tradisi pesantren dengan tuntutan modernisasi pendidikan.

Buku ini juga menyoroti konsep “kuasa” dalam perspektif pendidikan, di mana kiai dipahami sebagai pemilik kekuatan simbolik yang mampu memengaruhi arah kebijakan pendidikan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kuasa tersebut tidak selalu berbentuk struktural, tetapi bekerja melalui legitimasi sosial, moral, dan keagamaan yang mengakar kuat di masyarakat. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga ruang produksi nilai dan kekuasaan yang berkontribusi terhadap pembentukan sistem pendidikan Indonesia.

Selain itu, buku ini menggambarkan bagaimana pesantren menghadapi tantangan modernisasi, globalisasi, dan perubahan kebijakan pendidikan yang semakin kompleks. Kiai dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas keulamaan dan tradisi pesantren. Dari sinilah terlihat bahwa peran kiai sangat dinamis, tidak hanya sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam dunia pendidikan.

Secara keseluruhan, buku ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara agama, pendidikan, dan kekuasaan di Indonesia. Karya ini diharapkan menjadi referensi akademik yang bermanfaat bagi peneliti, mahasiswa, praktisi pendidikan, serta para pengambil kebijakan dalam merumuskan sistem pendidikan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkeadilan.



CV. Cita Cendekia
Jl. Jemur Wonosari Gg. Masjid No. 42
Wonocolo Surabaya
citacendekiaoffice@gmail.com

ISBN 978-634-05-0292-3



9

786340

502923